

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern Cet. 1*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Arto, Mukti. 2004. *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarieej, Eddy OS. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jhony, Ibrahim. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2004. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Makarao, Moh. Taufik dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muchsin. 2004. *Kebebasan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asas*. Jakarta: STIH IBLAM.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.

Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Putra, Risqi Perdana 2020. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Ramelan, 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori Dan Implementasi)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Ranuhandoko, 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudharmawatiningsih. 2015. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

Ariyanti, Vivi. 2019. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No.2.

- Dilla, Steylla Nanda dan Yuherman. 2020. "Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana". *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 2, No. 2*.
- Femylia, Denty Suci Mareta dan Muchammad Chasani. 2017. "Putusan Ultra Petita Dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur". *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), IJCLS II (1)*.
- Izaak, Risan. 2016. "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)". *Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016*".
- Karisa, Immaculta Anindya. 2020. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)". *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1*.
- Lumbantoruan, Ramot. 2019. "Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No. 2*.
- Makanoneng, Doddy. 2016. "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana". *Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016*.
- Milono, Aulia. 2014. "Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Arena Hukum Volume 7 Nomor 1*.
- Nugroho, Hibnu, Agus Raharjo, dan Pranoto. 2015. "The Optimization of Corruption Prevention Towards Indonesia Corruption-Free". *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.15 No.3*.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII*.
- Putra, Yagie Sagita. 2017. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Perkara Pidana". *UBELAJ, Volume 1 Number 1*.
- Selang, Daud Jonathan. 2012. "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen Vol.I/No.2*.

Setyanegara, Ery. 2013. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 4 Oktober-Desember*.

Wangol, Winly A. 2016. "Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Lex Privatum, Vol. IV/No. 7*.

Wiryanawan, Putu Ariesta dan Made Tjartayasa. 2016. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi". *Open Journal Systems Vol. 05, No. 02*.

Skripsi / Tesis

Marzuni, Elfi. 2009. "*Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*". Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Pemerintah Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Pemerintah Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 Nomor 44.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBG). Staatblad 1927 Nomor 227.